



Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Way Kanan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023

Jalan Camat Mas Enggung No.12
Komplek Perkantoran PEMDA
Blambangan Umpu
2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat serta hidayah-Nya jualah sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan ini dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah yang menggambarkan permasalahan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta indikasi daftar Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun yang akan datang yaitu Tahun 2023, untuk memecahkan permasalahan secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, ini di susun sebagai kelengkapan dokumen dan sebagai gambaran pelaksanaan program dan kegiatan serta besaran anggaran yang diperlukan pada Tahun Anggaran 2023.

Blambangan Umpu, Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN WAY KANAN



IKUAN AHMADI, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19751101 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	10
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	17
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2016-2021	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	29
3.2.1 Tujuan	30
3.2.2 Sasaran	31
3.3 Program dan Kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	37
BAB V PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Tujuan Dinas PMK	31
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	31

Lampiran-Lampiran :

1. Matrik RENSTRA 2021-2026.
2. Tabel IKU Dinas PMK 2021-2026.
3. Tabel 3.1
4. Struktur Dinas PMK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, perlu terus didukung dengan penciptaan iklim yang mendorong perkembangan pembangunan dalam artian pemberdayaan masyarakat, melalui pemanfaatan secara efektif berbagai potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan serta prasarana dan sarana guna mendukung berbagai kebijaksanaan pembangunan, terutama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Pengukuran keberhasilan pembangunan serta usaha pemecahan masalah yang data dan informasinya diperoleh dari hasil analisa data dasar profil desa, laporan pelaksanaan program/kegiatan serta informasi lainnya kita jadikan kelengkapan pedoman untuk menentukan arah dan kebijakan yang kita ambil dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Way Kanan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026, dan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan,

dalam pelaksanaannya memerlukan pemikiran dan kerja keras bagi semua jajaran staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, serta dukungan Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang terkait berperan aktif dalam membangun masyarakat yang pada akhirnya dapat diperoleh hasil maksimal.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendorong adanya paradigma baru dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum bagi sistem perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan atau disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai implikasi dari berlakunya Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan program kerja tahunan yang disebut dengan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, dimana Program dan Kegiatan mengacu pada arah kebijakan RKPD Kabupaten Way Kanan dan juga didasarkan pada antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi, masukan berbagai stakeholder, rapat forum SKPD dan berbagai dinamika perkembangan pembangunan terutama di lingkungan strategis perdesaan serta sinkronisasi Program dan Kegiatan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh Provinsi Lampung maupun kebijakan Pemerintah Pusat.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- Tahap perumusan rancangan Renja; dan
- Tahap penyajian rancangan Renja.

Penyusunan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dilakukan melalui serangkaian kegiatan berupa :

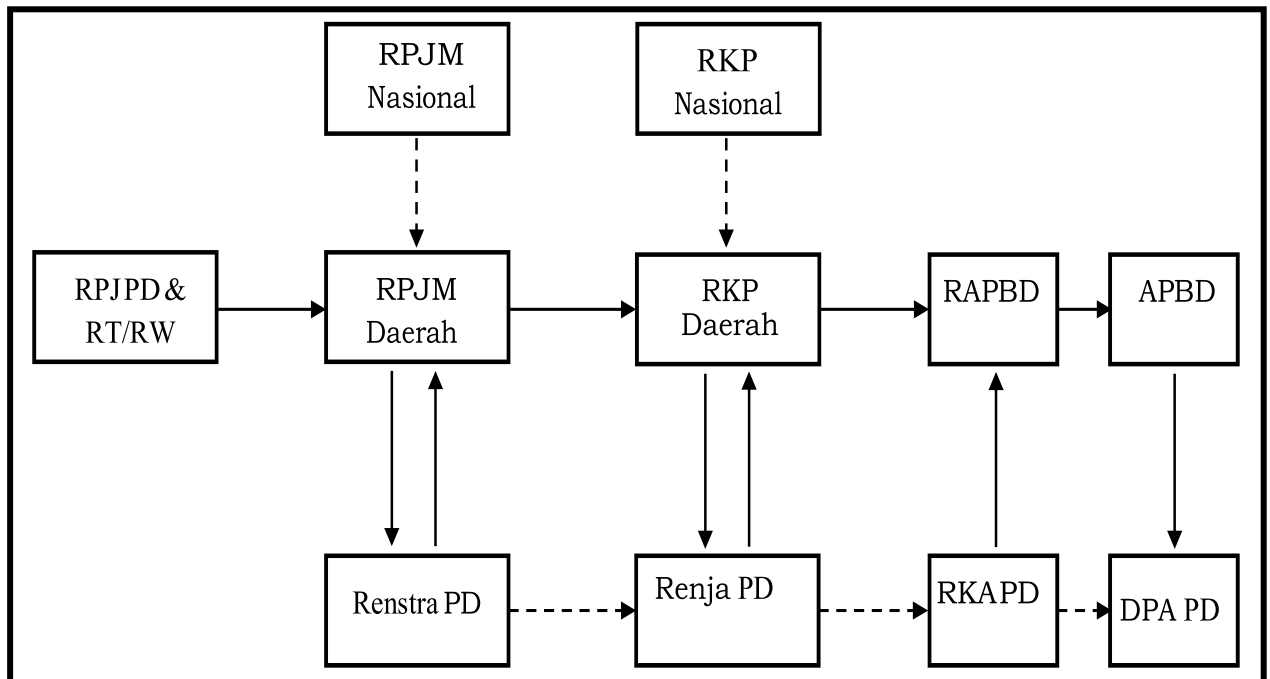
1. Menerima surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kabupaten Way Kanan tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Disposisi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 3. Pengolahan data informasi;
 4. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 5. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 6. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 7. Telaah terhadap rancangan awal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 8. Perumusan tujuan dan sasaran;
 9. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 10. Perumusan kegiatan prioritas;
 11. Penyajian awal dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 12. Penyempurnaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 13. Penyesuaian dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sesuai prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

Keterkaitan antara Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan RKP, Renstra dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.0

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi misi, dalam rangka mendukung Visi Pemerintahan Kabupaten Way Kanan yaitu **"Way Kanan Unggul dan Sejahtera"**, makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- Unggul** : suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain.
- Sejahtera** : kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psichis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi.

Secara umum visi “unggul dan sejahtera” tersebut dapat terwujud perlu didukung oleh kondisi tata kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia daerah.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari aparatur pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial Masyarakat, Lembaga pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan Way Kanan yang Unggul dan Sejahtera Tahun 2021-2026.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik. Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Way Kanan diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang selaras dengan pencapaian visi misi daerah dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten

berbasis kinerja. Selain itu dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berupaya melaksanakan pelayanan publik yang semakin baik;

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari dukungan kualitas lingkungan hidup. Keberadaan kawasan hutan, dan 6 sungai besar dengan daerah tangkapan airnya perlu terus dijaga dan dilestarikan sehingga ketersediaan air tetap terjaga dimasa depan. Selain itu upaya pencegahan pencemaran terus ditingkatkan.

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimulai dari mempersiapkan SDM dari masa kehamilan, kelahiran, perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Hal ini dilakukan melalui upaya meningkatkan kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi dan pangan, membangun karakter dan meningkatkan kualitas pengetahuan melalui pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan perlindungan dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bagi lansia, serta didukung lingkungan yang aman dan kondusif. Seiring dengan itu, perlu peningkatan kompetensi sumberdaya manusia daerah dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja yang ada terutama dalam menyambut “Bonus Demografi”. Disamping itu, perlu upaya seluruh

pemangku kepentingan menghadapi pandemic covid 19 terutama dalam rangka adaptasi terhadap kebiasaan baru.

Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur.

Memperkuat perekonomian Kabupaten Way Kanan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan berbasis kawasan di sektor pertanian, kemudian di tingkatkan nilai tambahnya melalui industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang baik perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Di wilayah sentra penanaman padi perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai baik bendungan, maupun saluran irigasi. Untuk memperlancar distribusi sarana prasarana produksi maupun pemasaran hasil perlu didukung oleh jalan-jalan strategis yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran. Selain itu didorong membangun sinergitas antar kampung dalam mengembangkan produk unggulan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dalam mendukung Misi Kabupaten Way Kanan yang sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan yaitu pada misi satu dan misi ketiga, yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”, dan “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah”.

b. Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam

KUA-PPAS dan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada 2023.

- c. Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui Capaian Kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Mengingat arti strategis Rencana Kerja (RENJA) SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026;
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) dilengkapi dengan Indikator hasil (outcome), indikator kinerja (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. LANDASAN HUKUM

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan dan Kampung Kabupaten Way Kanan, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026;
27. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud di susunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 adalah;

- Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023.
- Melakukan Singkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 adalah :

- Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.
- Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- Sebagai instrument untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel 2.1 terlampir)
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU (2021) DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH TAHUN BERJALAN (2022)

- a. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021) dan perkiraan capaian tujuan tahun berjalan, untuk menjadi acuan pada APBD tahun 2023.
- b. Pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- c. Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya :
 1. Realisasi program/kegiatan **yang tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 2. Realisasi program/kegiatan **yang telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 3. Realisasi program/kegiatan **yang melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra dan kinerja pelayanan SKPD;
 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

(Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan sesuai Tabel yang disajikan sebagaimana Lampiran 1).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- a. Capaian kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- b. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai tugas dan fungsi;
- c. Analisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008 dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

- a. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sekaligus menetapkannya menjadi visi, misi dan program dan kegiatan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan;
 2. Untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas PMK;
 3. Penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dins PMK Kabupaten Way Kanan.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Secara struktur organisasi, saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsi telah memenuhi kriteria organisasi yang diisyaratkan. **Keberadaan Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang (Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung, Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung dan Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung)** telah sesuai dan dapat mendukung tugas dan fungsi SKPD. Kedepan, pengembangan kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat dan kampung. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan

hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum jelasnya strategi pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja, serta sistem kompensasi pegawai. Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan pemberdayaan masyarakat dan kampung;
2. Belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan;
3. Belum maksimalnya fungsi koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan kecamatan dan kampung;
4. Masih besarnya jumlah penduduk miskin karena kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh keluarga miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya.
5. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan karena belum efektifitasnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.

6. Belum mantapnya kehidupan sosial budaya masyarakat yang disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
7. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal.
8. Masih relatif terbatasnya kemampuan pemerintah kampung dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah kampung dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
9. Belum terbiasanya masyarakat mendayagunakan teknologi tepat guna dalam mengelola usaha ekonomi produktif, sehingga tidak tercapai peningkatan produktifitas kerja dan peningkatan nilai tambah produksi hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
10. Masih rendahnya keswadayaan dan kemandirian masyarakat kampung dalam membangun, memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana perkampungan.
11. Masih rendahnya pengetahuan Aparatur Kampung dalam pengelolaan keuangan kampung yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah.

c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;

Disamping permasalahan seperti pada poin (b) diatas, pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan memiliki tantangan dan peluang besar untuk meningkatkan pengembangan potensi yang mungkin timbul dari ekstern organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung baik pengaruh positif ataupun negatif, sehingga sangat mempengaruhi implementasi Rencana Kerja (Renja) SKPD kedepannya, ketika berbicara mengenai Tantangan dan Peluang tentu tidak akan terlepas dengan adanya Potensi Kekuatan dan Kelemahan yang bersumber dari intern organisasi, berikut potensi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan :

1. Potensi Kekuatan :

- (1) Terisinya seluruh Jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- (2) Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan;
- (3) Adanya koordinasi yang baik antar bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- (4) Adanya iklim yang kondusif didalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- (5) Kepemilikan kewenangan dalam menyusun kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;

- (6) Tingkat pendidikan pegawai pada Dinas PMK Kabupaten Way Kanan adalah rata-rata S-1 & S-2.

2. Potensi Kelemahan :

- (1) Kurangnya sarana dan prasarana kerja yang memadai (meliputi : gedung, ruang arsip, kendaraan dinas untuk pelaksanaan monitoring ke lapangan dan sarana pendukung lainnya);
- (2) Kurangnya kuantitas pegawai (staf) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

3. Potensi Peluang :

- (1) Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (good government) dan pemerintahan yang bersih (good government);
- (2) Adanya koordinasi yang baik dan harmonis antar Organisasi Perangkat Daerah;
- (3) Adanya koordinasi yang baik dan harmonis antar dari pihak kecamatan dan kampung di wilayah Kabupaten Way Kanan ;
- (4) Tersedianya jaringan Internet online disemua SKPD Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

4. Potensi Tantangan :

- (1) Sering berubahnya produk hukum Nasional;
- (2) Jarak tempuh yang relatif jauh antara kampung, kecamatan dan kabupaten;
- (3) Peran serta masyarakat dalam program pembangunan Kampung yang kurang, selama ini Pemerintah Kampung (Kepala Kampung dan Pamong),

melaksanakan program-program desa yang bercorak *top-down*, atau setidaknya “*semi-top down*”, sementara input berupa peran aktif masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan riil tidak berjalan maksimal;

- (4) Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) belum sepenuhnya mampu beriringan/sejalan dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung.
- d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.

Masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan saat ini adalah :

1. Masih besarnya jumlah penduduk miskin karena kurang berkembangnya Usaha Ekonomi Produktif yang dikelola oleh keluarga miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya.
2. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan karena belum efektifitasnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.

3. Belum mantapnya kehidupan sosial budaya masyarakat yang disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
4. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal.
5. Masih relatif terbatasnya kemampuan pemerintah kampung dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah kampung dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
6. Belum terbiasanya masyarakat mendayagunakan teknologi tepat guna dalam mengelola usaha ekonomi produktif, sehingga tidak tercapai peningkatan produktifitas kerja dan peningkatan nilai tambah produksi hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Masih rendahnya keswadayaan dan kemandirian masyarakat kampung dalam membangun, memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana perkampungan.
8. Masih rendahnya pengetahuan Aparatur Kampung dalam pengelolaan keuangan kampung yang transparan dan akuntabel yang sesuai ketentuan perundang-undangan serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Hasil review terhadap Rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pada hasil analisa kebutuhan untuk tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yaitu :

1. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa tidak dilaksanakan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
2. Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat tidak dilaksanakan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
3. Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna tidak dilaksanakan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

- a. Kajian terhadap program /kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan SKPD Provinsi, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

- b. Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini antara lain:
1. Proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan di peroleh;
 2. Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD (Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat sesuai lampiran 1 Tabel 2.4).

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan Kabupaten (Desentralisasi) dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah, serta tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan dibidang Pembinaan Pemerintahan dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
2. Perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan dibidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung;
3. Perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan dibidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
5. Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
6. Pelaksanaan administrasi dan Tata Usaha Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Untuk merealisasikan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator RPJMD tahun 2021–2026 Kabupaten Way Kanan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran indikator sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMK) Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dimana tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Way Kanan.

Dalam RPJMD tahun 2021–2026 Kabupaten Way Kanan terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan :

Visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yaitu ***”Way Kanan Unggul dan Sejahtera”***.

b. Misi Ke-1 dan 3:

Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari aparatur pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial Masyarakat, Lembaga pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan Way Kanan Unggul dan Sejahtera Tahun 2021-2026. Terkait yang menjadi tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) mengemban Misi kesatu dan Misi ketiga yaitu: Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan

Misi 3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah.

- c. Tujuan: **1.Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah.**
2.Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung.
dengan indikator: 1.Nilai Evaluasi Sakip. 2.Indeks Desa Membangun.
- d. Sasaran: **1.Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD.**
2.Meningkatkan Kualitas Kampung.
dengan indikator: 1.Nilai Sakip Dinas PMK. 2.Indeks Kategori Kampung.

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD tahun 2021–2026 Kabupaten Way Kanan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Way Kanan dijabarkan dalam rencana strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) sebagai berikut:

3.2.1. TUJUAN

Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Kampung telah menetapkan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, yaitu: **1.Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2.Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung.**

Tabel 3.1

Tujuan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP

2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun
----	---	-----------------------

3.2.2. SASARAN

Untuk Pencapaian Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, maka disusun Sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, yakni:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP OPD
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi pemerintah Kabupaten Way Kanan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud, di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan.

TUJUAN

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan adalah :

1. Mengembangkan keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan;

2. Memantapkan kondisi sosial budaya masyarakat yang kondusif untuk proses pembangunan;
3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat sebagai basis perekonomian daerah;
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan;
5. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menciptakan, mengembangkan, memasyarakatkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam;
6. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

SASARAN

Pencapaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat kampung ditentukan oleh sasaran sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- c. Pembinaan dan fasilitasi pemerintahan kampung;
- d. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
- e. Peningkatan Partisipasi dalam membangun desa;
- f. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- g. Peningkatan peran Perempuan di Pedesaan;
- h. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 disusun berdasarkan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Way Kanan;
2. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan Nasional;
3. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan.

Program dan Kegiatan Dinas PMK kabupaten Way Kanan Tahun 2023 direncanakan berjumlah 4 Program, 10 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yang sebagian besar merupakan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 6.352.602.334,- (*enam milyar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*).

Adapun rencana program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan yaitu :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- 2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5.2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
- 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 6.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 6.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 9.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 9.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

9.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

1.2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota.

C. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;

1.3 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;

1.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;

1.8 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa;

1.9 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

1.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;

1.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;

1.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;

1.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1.2 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- 1.6 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- 1.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;
- 1.9 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 yang bersumber dari APBD Kabupaten Way Kanan, telah direncanakan berjumlah 4 Program, 10 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yang sebagian besar merupakan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 6.352.602.334,- (*enam milyar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*).

Rencana program kerja dan kegiatan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan disajikan dalam bentuk tabel 3.1 (tabel terlampir).

BAB V

PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran sesuai dengan karakteristik lokal dan kondisi faktual masyarakat di Kabupaten Way Kanan, maka disusunlah rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.

Agar kita dapat melaksanakan Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya dan menjadikan Rencana Kerja (Renja) ini sebagai Pedoman dan Penyusunan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023, sampai dengan tahapan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang dimulai dengan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta prioritas dan Plafon Anggaran sementara.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, sebagai bahan arahan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN WAY KANAN

URUSAN : WAJIB NON PELAYAN DASAR SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan/Output)	RENCANA TAHUN 2023					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024				
Kode							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)			Jumlah	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
X																
X	XX				WAJIB NON PELAYAN DASAR/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas PMK	Blambangan Umpu	100%	-	5,285,000.00	-	5,285,000.00	DAU	100%	5,813,500.00	DAU
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Blambangan Umpu	2 Dokumen, 2 Laporan								
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Blambangan Umpu	1 Dokumen	-	1,126,000.00	-	1,126,000.00	DAU	1 Dokumen	1,238,600.00	DAU
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Blambangan Umpu	1 Dokumen	-	1,175,000.00	-	1,175,000.00	DAU	1 Dokumen	1,292,500.00	DAU
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Blambangan Umpu	1 Laporan	-	1,296,000.00	-	1,296,000.00	DAU	1 Laporan	1,425,600.00	DAU
X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Blambangan Umpu	1 Laporan	-	1,688,000.00	-	1,688,000.00	DAU	1 Laporan	1,856,800.00	DAU
X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMK	Blambangan Umpu	100%	2,205,769,949.00	80,912,000.00	-	2,286,681,949.00	DAU	100%	2,515,350,143.90	DAU
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Blambangan Umpu	22 org/bulan, 4 Dokumen, 2 Laporan								
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Blambangan Umpu	22 Orang/Bulan	2,167,969,949.00	-	-	2,167,969,949.00	DAU	22 Orang/Bulan	2,384,766,943.90	DAU
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Blambangan Umpu	4 Dokumen	37,800,000.00	78,000,000.00	-	115,800,000.00	DAU	4 Dokumen	127,380,000.00	DAU
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Blambangan Umpu	1 Laporan	-	1,586,000.00	-	1,586,000.00	DAU	1 Laporan	1,744,600.00	DAU
X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Blambangan Umpu	1 Laporan	-	1,326,000.00	-	1,326,000.00	DAU	1 Laporan	1,458,600.00	DAU
X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	Blambangan Umpu	100%	-	-	18,600,000.00	18,600,000.00	DAU	100%	20,460,000.00	DAU
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Blambangan Umpu	35 Paket								
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Blambangan Umpu	32 Paket	-	-	18,600,000.00	18,600,000.00	DAU	32 Paket	20,460,000.00	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan/Output)	RENCANA TAHUN 2023					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)			Jumlah	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
									Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal					
X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	Blambangan Umpu	100%	-	228,962,085.00	-	228,962,085.00	DAU	100%	251,858,293.50	DAU
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Blambangan Umpu	3 Paket, 3 laporan								
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Blambangan Umpu	1 Paket	-	3,066,000.00	-	3,066,000.00	DAU	1 Paket	3,372,600.00	DAU
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Blambangan Umpu	1 Paket	-	27,393,385.00	-	27,393,385.00	DAU	1 Paket	30,132,723.50	DAU
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Blambangan Umpu	1 Paket	-	3,582,700.00	-	3,582,700.00	DAU	1 Paket	3,940,970.00	DAU
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Blambangan Umpu	1 Laporan	-	8,220,000.00	-	8,220,000.00	DAU	1 Laporan	9,042,000.00	DAU
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Blambangan Umpu	1 Laporan	-	186,700,000.00	-	186,700,000.00	DAU	1 Laporan	205,370,000.00	DAU
X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	Blambangan Umpu	100%	-	-	27,161,000.00	27,161,000.00	DAU	100%	29,877,100.00	DAU
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Blambangan Umpu	2 unit								
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Blambangan Umpu	2 Unit Laptop . 1 Unit LCD Monitor	-	-	27,161,000.00	27,161,000.00	DAU	2 Unit Laptop . 1 Unit LCD Monitor	29,877,100.00	DAU
X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	Blambangan Umpu	100%	-	181,883,000.00	-	181,883,000.00	DAU	100%	200,071,300.00	DAU
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Blambangan Umpu	5 Laporan								
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Jaringan Internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Blambangan Umpu	3 Laporan	-	127,740,000.00	-	127,740,000.00	DAU	3 Laporan	140,514,000.00	DAU
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Blambangan Umpu	2 Laporan	-	54,143,000.00	-	54,143,000.00	DAU	2 Laporan	59,557,300.00	DAU
X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	Blambangan Umpu	100%	-	74,200,000.00	-	74,200,000.00	DAU	100%	81,620,000.00	DAU
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Blambangan Umpu	20 Unit								
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Blambangan Umpu	2 Unit	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	DAU	2 Unit	55,000,000.00	DAU
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Blambangan Umpu	16 Unit	-	9,200,000.00	-	9,200,000.00	DAU	16 Unit	10,120,000.00	DAU
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Blambangan Umpu	2 Unit	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	DAU	2 Unit	16,500,000.00	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan/Output)	RENCANA TAHUN 2023					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)			Jumlah	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
									Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal					
2	13	03			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Kerjasama Kampung	Blambangan Umpu	100%	-	44,342,000.00	-	44,342,000.00	DAU	100%	48,776,200.00	DAU
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Blambangan Umpu	4 Dokumen								
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Blambangan Umpu	4 Dokumen	-	44,342,000.00	-	44,342,000.00	DAU	4 Dokumen	48,776,200.00	DAU
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Tertib Administrasi Kampung	Blambangan Umpu	100%	-	1,348,663,600.00	-	1,348,663,600.00	DAU	100%	1,483,529,960.00	DAU
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Blambangan Umpu	442 Dokumen, 221 Org, 118 Laporan, 1 Dokumen								
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Blambangan Umpu	221 Dokumen	-	92,109,600.00	-	92,109,600.00	DAU	221 Dokumen	101,320,560.00	DAU
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Blambangan Umpu	118 Laporan	-	952,892,700.00	-	952,892,700.00	DAU	-	1,048,181,970.00	DAU
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Blambangan Umpu	221 Dokumen	-	131,243,400.00	-	131,243,400.00	DAU	221 Dokumen	144,367,740.00	DAU
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Blambangan Umpu	221 Orang	-	79,800,000.00	-	79,800,000.00	DAU	221 Orang	87,780,000.00	DAU
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Blambangan Umpu	1 Dokumen	-	92,617,900.00	-	92,617,900.00	DAU	1 Dokumen	101,879,690.00	DAU
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	Blambangan Umpu	100%	-	366,194,200.00	-	366,194,200.00	DAU	100%	402,813,620.00	DAU
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Blambangan Umpu	663 Dokumen, 21 Dokumen								
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Desa	Blambangan Umpu	221 Dokumen	-	74,540,300.00	-	74,540,300.00	DAU	221 Dokumen	81,994,330.00	DAU
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Blambangan Umpu	221 Dokumen	-	122,348,900.00	-	122,348,900.00	DAU	221 Dokumen	134,583,790.00	DAU
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Blambangan Umpu	21 Dokumen	-	86,805,000.00	-	86,805,000.00	DAU	21 Dokumen	95,485,500.00	DAU
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Blambangan Umpu	221 Dokumen	-	82,500,000.00	-	82,500,000.00	DAU	221 Dokumen	90,750,000.00	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan/Output)	RENCANA TAHUN 2023					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)			Jumlah	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
									Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal					
2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	Blambangan Umpu	100%	-	1,770,629,500.00	-	1,770,629,500.00	DAU	100%	1,947,692,450.00	DAU
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat	Blambangan Umpu	3 Dokumen, 1 Laporan								
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Blambangan Umpu	1 Dokumen	-	75,977,000	-	75,977,000.00	DAU	1 Dokumen	83,574,700.00	DAU
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		1 Laporan	-	119,652,900.00	-	119,652,900.00	DAU	1 Laporan	131,618,190.00	DAU
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Blambangan Umpu	1 Dokumen	-	1,106,200,000.00	-	1,106,200,000.00	DAU	1 Dokumen	1,216,820,000.00	DAU
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Blambangan Umpu	1 Dokumen	-	468,799,600.00	-	468,799,600.00	DAU	1 Dokumen	515,679,560.00	DAU
JUMLAH BELANJA LANGSUNG									2,205,769,949.00	4,101,071,385.00	45,761,000.00	6,352,602,334.00	DAU		6,957,985,467.40	DAU

Blambangan Umpu, April 2022
 Kepala Dinas
 Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung


WIKMAN ANWADI, S.Sos., MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19751101 199503 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 050/257/IV.13-WK/2022
 TANGGAL : 16 November 2022
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG TAHUN 2021-2026

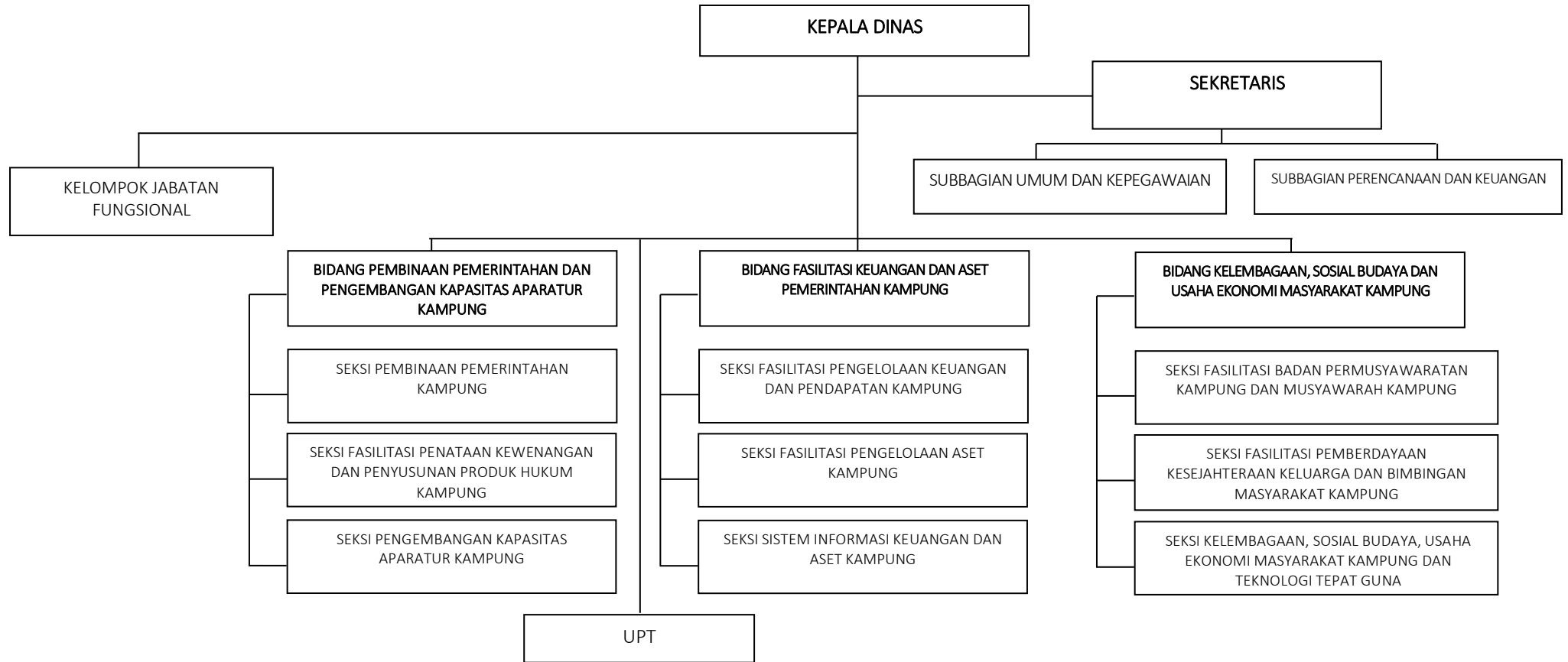
**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN
 TAHUN 2021-2026**

Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik.
 Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia.

NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9					
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP			Penilaian Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)	Poin	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64
			Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK	Penilaian Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)	Poin	64,16	65,16	66,16	67,16	68,16	69,16
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun			Rilis Kemendesa	Poin	0,6558	0,6583	0,6608	0,6633	0,6658	0,6683
			Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung	Rilis Kemendesa	Poin	3,05	3,13	3,19	3,25	3,29	3,29
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Nilai IKE	Sesuai rumus IDM bagian IKE	Poin	0,5517	0,5925	0,6333	0,6741	0,7149	0,7557
			Meningkatnya Ketahanan Sosial	Nilai IKS	Sesuai rumus IDM bagian IKS	Poin	0,7718	0,7957	0,8196	0,8435	0,8638	0,8841
			Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Nilai IKL	Sesuai rumus IDM bagian IKL	Poin	0,6423	0,6854	0,7285	0,7716	0,8147	0,8578


**KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN,**
IXUAN AHMADI, S.Sos., MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19751101 199503 1 001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN



(Sumber : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018)

RPJMD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

KABUPATEN WAY KANAN

PERIODE 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	
	Misi 1. Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Baik																		
	1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (tujuan skpd)	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	58,64	59,64			60,64		61,64		62,64		63,64		64,64			
	1.1.5 Meningkatkan Kualitas Sakip SKPD (sasaran skpd)	Nilai SAKIP OPD	Poin	50,34	52,75			55,17		57,58		60		62,5		65			
	1.1.3.9 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PMK (strategi)	Nilai SAKIP OPD																	
	1.1.3.46 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas PMK	Poin	64,16	65,16	5,357,880	66,16	5,893,668	67,16	6,483,035	68,16	7,131,338	69,16	7,131,338	69,16	7,131,338	69,16	36,868,059	DINAS PMK
	1.1.3.46.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	4	5,357,880	4	5,893,668	4	6,483,035	4	7,131,338	4	7,131,338	24		36,868,059		
	1.1.3.46.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1,230,000	1	1,353,000	1	1,488,300	1	1,637,130	1	1,637,130	6		8,575,560		
	1.1.3.46.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1,250,600	1	1,375,660	1	1,513,226	1	1,664,549	1	1,664,549	6		8,718,583		
	1.1.3.46.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	1	1	1,195,200	1	1,314,720	1	1,446,192	1	1,590,811	1	1,590,811	6		8,333,534		
	1.1.3.46.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1,682,080	1	1,850,288	1	2,035,317	1	2,238,848	1	2,238,848	6		11,240,382		
	1.6 Meningkatkan Kinerja Organisasi (tujuan skpd)	Nilai Komponen Kinerja Organisasi	poin	4,95	5,25			5,55		5,85		6,15		6,45		6,45			
	1.6.2 Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara (sasaran skpd)	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	61	62			63		64		64		65		65			
	1.6.2.9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMK	Poin	53,77	54,77	6,160,000	55,77	6,776,000	56,77	7,453,600	57,77	7,453,600	57,77	8,198,960	57,77	8,198,960	57,77	41,642,160	
	1.6.2.9.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3	3	6,160,000	3	6,776,000	3	7,453,600	3	7,453,600	3	8,198,960	3	8,198,960	18		
	1.6.2.9.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	2,185,700	1	2,404,270	1	2,644,697	1	2,644,697	1	2,909,167	6		14,775,531		
	1.6.2.9.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	1,991,000	1	2,190,100	1	2,409,110	1	2,409,110	1	2,650,021	6		13,459,341		
	1.6.2.9.1.5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1,983,300	1	2,181,630	1	2,399,793	1	2,399,793	1	2,639,772	6		13,407,288		
	1.6.4 Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah (sasaran skpd)	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	%	100		100		100		100		100		100				
	1.6.4.9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	%	%	100	5,395,785,135	100	5,394,633,347	100	5,393,366,380	100	5,491,972,717	100	5,491,972,717	100	5,491,972,717	100	32,071,923,981	
	1.6.4.9.1 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		94	94	5,047,118,135	94	5,024,139,647	94	5,060,546,580	94	5,136,080,937	94	5,136,080,937	94	5,136,080,937	94	29,976,289,921	
	1.6.4.9.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	22	22	4,818,206,360	22	4,833,633,803	22	4,833,633,803	22	4,888,581,351	22	4,888,581,351	22	4,888,581,351	22	28,642,824,268	
	1.6.4.9.1.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	5	91,920,000	5	91,920,000	5	91,920,000	5	101,112,000	5	101,112,000	5	101,112,000	5	559,584,000	
	1.6.4.9.1.3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	4,544,681	1	4,497,381	1	4,544,681	1	4,544,681	1	4,544,681	1	4,544,681	1	25,742,105	
	1.6.4.9.1.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	27,968,404	1	28,071,904	1	28,133,881	1	30,947,269	1	31,004,502	1	31,004,502	1	168,518,145	
	1.6.4.9.1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	3,978,690	1	4,376,559	1	4,814,215	1	5,295,636	1	5,238,403	1	5,238,403	1	27,281,403	
	1.6.4.9.1.6 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	16,500,000	1	11,640,000	1	16,500,000	1	16,500,000	1	16,500,000	1	16,500,000	1	94,140,000	
	1.6.4.9.1.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	84,000,000	1	50,000,000	1	81,000,000	1	89,100,000	1	89,100,000	1	89,100,000	1	458,200,000	
	1.6.4.9.2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		41	41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	290,400,000	
	1.6.4.9.2.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	36	36	23,400,000	36	23,400,000	36	23,400,000	36	23,400,000	36	23,400,000	36	23,400,000	36	140,400,000	
	1.6.4.9.2.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	150,000,000	
	1.6.4.9.3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16	16	77,000,000	16	81,500,000	16	75,000,000	16	82,500,000	16	82,500,000	16	82,500,000	16	475,500,000	
	1.6.4.9.3.1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	12	42,000,000	12	43,000,000	12	40,000,000	12	44,000,000	12	44,000,000	12	44,000,000	12	255,000,000	
	1.6.4.9.3.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	35,000,000	4	38,500,000	4	35,000,000	4	38,500,000	4	38,500,000	4	38,500,000	4	220,500,000	
	1.6.4.9.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36	36	133,947,000	36	147,341,700	36	124,719,800	36	130,791,780	36	130,791,780	36	130,791,780	36	789,362,060	
	1.6.4.9.4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	69,300,000	4	76,230,000	4	64,000,000	4	64,000,000	4	64,000,000	4	64,000,000	4	400,530,000	
	1.6.4.9.4.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	6,380,000	2	7,018,000	2	7,719,800	2	8,491,780	2	8,491,780	2	8,491,780	2	43,901,360	
	1.6.4.9.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	58,267,000	3	64,093,700	3	53,000,000	3	58,300,000	3	58,300,000	3	58,300,000	3	344,930,700	
	1.6.4.9.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		30	30	89,320,000	30	93,252,000	30	84,700,000	30	94,200,000	30	94,200,000	30	94,200,000	30	540,372,000	
	1.6.4.9.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	300,000,000	

	1.6.4.9.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	16	10,120,000	16	11,132,000	16	9,200,000	16	9,200,000	16	9,200,000	16	58,052,000	
	1.6.4.9.5.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	29,200,000	2	32,120,000	2	25,500,000	2	35,000,000	2	35,000,000	2	182,320,000	
Misi 3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia																		
	1.9	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung (tujuan skpd)	Indeks Desa Membangun	Poin	0.6558	0.6683	0.6608	0.6633	0.6658	0.6683	0.6658	0.6683	0.6683	0.6683	0.6683	0.6683		
	1.9.1	Meningkatkan Kualitas Kampung (sasaran skpd)	Indeks Kategori Kampung	Poin	3.05	3.13	3.19	3.22	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29		
	3.9.1.1	Meningkatkan Penataan Kampung (strategi)	Cakupan Penataan Kampung	%	10	14	100,000,000	16	100,000,000	18	100,000,000	20	100,000,000	23	100,000,000	23	600,000,000	DINAS PMK
	1.9.1.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Peningkatan Kualitas Kampung	%	10	14	100,000,000	16	100,000,000	18	100,000,000	20	100,000,000	23	100,000,000	23	600,000,000	DINAS PMK
	1.9.1.1.1.1	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	6	221	55,000,000	221	55,000,000	221	55,000,000	221	55,000,000	221	55,000,000	221	330,000,000	DINAS PMK
	1.9.1.1.1.2	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	0	221	45,000,000	221	45,000,000	221	45,000,000	221	45,000,000	221	45,000,000	221	270,000,000	DINAS PMK
	3.9.1.2	Meningkatkan Kerjasama Kampung (strategi)	Cakupan Kerjasama Kampung	%	7	10	200,403,600	14	200,403,600	21	200,403,600	23	200,403,600	25	200,403,600	25	1,202,421,600	DINAS PMK
	1.9.1.2.1	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Fasilitas Kerjasama Antar Desa	Dokumen	4	4	200,403,600	4	200,403,600	4	200,403,600	4	200,403,600	4	200,403,600	4	1,202,421,600	DINAS PMK
	1.9.1.2.1.1	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	200,403,600	4	200,403,600	4	200,403,600	4	200,403,600	4	200,403,600	4	1,202,421,600	DINAS PMK
	3.9.1.3	Meningkatkan Tertib Administrasi Kampung (strategi skpd)	Cakupan Tertib Administrasi Kampung	%	100	100	809,843,400	100	320,942,500	100	320,942,500	100	320,942,500	100	320,942,500	100	2,903,456,800	DINAS PMK
	1.9.1.3.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	221	221	83,736,000	221	43,736,000	221	43,736,000	221	43,736,000	221	43,736,000	221	342,416,000	DINAS PMK
	1.9.1.3.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	85	118	320,900,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,801,800	DINAS PMK
	1.9.1.3.1.2	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	221	221	50,704,000	221	50,704,000	221	50,704,000	221	50,704,000	221	50,704,000	221	374,224,000	DINAS PMK
	1.9.1.3.1.3	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	221	221	45,579,600	221	35,579,600	221	35,579,600	221	35,579,600	221	35,579,600	221	233,477,600	DINAS PMK
	1.9.1.3.1.4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	1	1	93,922,900	1	65,922,900	1	65,922,900	1	65,922,900	1	65,922,900	1	451,537,400	DINAS PMK
	1.9.1.3.1.5	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	221	221	55,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	221	250,000,000	DINAS PMK
	1.9.1.3.1.6	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	221	221	65,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	221	270,000,000	DINAS PMK
	1.9.1.3.1.7	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	221	221	35,000,000	221	30,000,000	221	30,000,000	221	30,000,000	221	30,000,000	221	190,000,000	DINAS PMK
	1.9.1.3.1.8	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	221	221	25,000,000	221	25,000,000	221	25,000,000	221	25,000,000	221	25,000,000	221	150,000,000	DINAS PMK
	1.9.1.3.1.9	Fasilitasi Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Desa	221	221	82,500,000	221	82,500,000	221	82,500,000	221	82,500,000	221	82,500,000	221	495,000,000	DINAS PMK
	3.9.1.4	Meningkatkan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung (strategi skpd)	Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	%	100	100	342,259,000	100	342,259,000	100	342,259,000	100	342,259,000	100	342,259,000	100	2,053,554,000	DINAS PMK
	1.9.1.4.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	221	221	74,540,300	221	74,540,300	221	74,540,300	221	74,540,300	221	74,540,300	221	447,241,800	DINAS PMK
	1.9.1.4.1.1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	221	221	85,448,900	221	85,448,900	221	85,448,900	221	85,448,900	221	85,448,900	221	512,693,400	DINAS PMK
	1.9.1.4.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	20	20	99,769,800	50	99,769,800	21	99,769,800	21	99,769,800	21	99,769,800	21	598,618,800	DINAS PMK
	1.9.1.4.1.3	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	221	221	82,500,000	221	82,500,000	221	82,500,000	221	82,500,000	221	82,500,000	221	495,000,000	DINAS PMK
	1.9.1.4.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	43	43	2,412,148,500	51	2,412,148,500	55	2,412,148,500	60	2,412,148,500	66	2,412,148,500	66	14,472,891,000	DINAS PMK
	3.9.1.5	Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat Kampung (strategi skpd)	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat Kampung	%	43	43	2,412,148,500	51	2,412,148,500	55	2,412,148,500	60	2,412,148,500	66	2,412,148,500	66	14,472,891,000	DINAS PMK
	1.9.1.5.1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	4	4	65,346,000	4	65,346,000	4	65,346,000	4	65,346,000	4	65,346,000	4	392,076,000	DINAS PMK
	1.9.1.5.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	540,000,000	DINAS PMK
	1.9.1.5.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	27	27	75,750,000	27	75,750,000	27	75,750,000	27	75,750,000	27	75,750,000	27	454,500,000	DINAS PMK
	1.9.1.5.1.3	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	1	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	1,800,000,000	DINAS PMK
	1.9.1.5.1.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	Dokumen	1	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	1,800,000,000	DINAS PMK

	1.9.1.5.1.5	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	195,352,900	1	195,352,900	1	195,352,900	1	195,352,900	1	195,352,900	1	1,172,117,400	DINAS PMK
	1.9.1.5.1.6	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	3	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	1,500,000,000	DINAS PMK
	1.9.1.5.1.7	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1	1	1,116,900,000	1	1,116,900,000	1	1,116,900,000	1	1,116,900,000	1	1,116,900,000	1	5,701,400,000	DINAS PMK
	1.9.1.5.1.8	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	318,799,600	1	318,799,600	1	318,799,600	1	318,799,600	1	318,799,600	1	1,912,797,600	DINAS PMK
	1.6	Menurunnya Tingkat Kemiskinan (tujuan skpd)	Angka Kemiskinan	%	12.75	12.35		11.9	11.4		10.7		9.99		9.99			
	1.6.3	Pemberdayaan Masyarakat Miskin (sasaran skpd)	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	%		2.08		2.08	2.08		2.08		2.08		2.08			
	3.6.3.14	Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kampung (strategi)																
	1.6.3.14	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	%	0.15	0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	531,540,101	0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	3,650,661,101	DINAS PMK
	1.6.3.14.1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Peikutnya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat															
	1.6.3.14.1	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	4	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	1,200,000,000	DINAS PMK
	1.6.3.14.1	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	Dokumen	1	1	421,713,500	1	421,713,500	1	331,540,101	1	421,713,500	1	421,713,500	1	2,450,661,101	DINAS PMK
	1.6.4	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbagai Pihak (sasaran skpd)	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Sinergi dengan Berbagai Pihak	%	0	0.30	621,713,500	0.30	621,713,500	0.30	531,540,000	0.30	621,713,500	0.30	621,713,500	0.30	3,650,661,000	
	3.6.4	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan terutama persentil 1-13 dengan Pemerintahan Kampung (strategi)																
	3.6.4.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Yang diberdayakan Melalui Dana Desa	%	0	0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	531,540,000	0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	3,650,661,000	DINAS PMK

Tabel T.C. 27
 Reviu Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas PMK
 KABUPATEN WAY KANAN
 Tahun 2021-2026

MISI 1 DAN 3

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Pemangkuangswah	Lokasi	
						Tahun 2021 Tahun-1		Tahun 2022 Tahun-2		Tahun 2023 Tahun-3		Tahun 2024 Tahun-4		Tahun 2025 Tahun-5		Tahun 2026 Tahun-6					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah				Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	57,64 Poin	58,64	-8	59,64 Poin	-10	60,64 Poin	-12	61,64 Poin	-14	62,64 Poin	-16	63,64 Poin	-18	64,64 Poin	-20	-21	-22
	1.1.5. Meningkatkan Kualitas Sakip SKPD			Nilai SAKIP OPD	47,92 Poin	50,34 Poin		52,75 Poin		55,17 Poin		57,58 Poin		60 Poin		62,5 Poin		65 Poin			
		1.1.3.46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas PMK	63,16 Poin	64,16 Poin	4,870,800	65,16 Poin	5,357,880	66,16 Poin	5,893,668	67,16 Poin	6,483,035	68,16 Poin	7,131,338	69,16 Poin	7,131,338	69,16 Poin	36,868,059	DINAS PMK	Way Kanan
		1.1.3.46.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4,870,800	4	5,357,880	4	5,893,668	4	6,483,035	4	7,131,338	4	7,131,338	24	36,868,059	DINAS PMK		
		1.1.3.46.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja SKPD dan dokumen evaluasi Renja SKPD	2 Dokumen	1,230,000	1 Dokumen	1,230,000		1 Dokumen	1,353,000	1 Dokumen	1,488,300	1 Dokumen	1,637,130	1 Dokumen	1,637,130	3 Dokumen	2,460,000		Way Kanan
		1.1.3.46.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	1,250,000	1 Dokumen	1,250,600		1 Dokumen	1,375,660	1 Dokumen	1,513,226	1 Dokumen	1,664,549	1 Dokumen	1,664,549	3 Dokumen	2,500,600		Way Kanan
		1.1.3.46.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1,195,000	1 Laporan	1,195,200		1 Laporan	1,314,720	1 Laporan	1,446,192	1 Laporan	1,590,811	1 Laporan	1,590,811	1 Laporan dan 1 Dokumen	2,391,000		Way Kanan
		1.1.3.46.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1,195,000	1 Laporan	1,682,080		1 Laporan	1,850,288	1 Laporan	2,035,317	1 Laporan	2,238,848	1 Laporan	2,238,848	1 Laporan dan 1 Dokumen	2,877,080		Way Kanan
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1,850,288	1 Laporan	2,035,317	1 Laporan	2,238,848	1 Laporan	2,238,848	4 Laporan		8,363,302			
1.6. Meningkatnya Kinerja Organisasi				Nilai Komponen Kinerja Organisasi	464 Poin	435 Poin		325 Poin		333 Poin		385 Poin		415 Poin		645 Poin		645 Poin			
	1.6.2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara			Indeks Profesionalitas ASN	58 Poin	61 Poin		62		63		64		64		65		65			
		1.6.2.9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMK	51,77 Poin	53,77 Poin	5,600,000	54,77	6,160,000	55,77	6,776,000	56,77	7,453,600	57,77	7,453,600	57,77	8,198,960	57,77	41,642,160		
		1.6.2.9.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	5,600,000	3	6,160,000	3	6,776,000	3	7,453,600	3	7,453,600	3	8,198,960	18	41,642,160			
		1.6.2.9.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1,987,000	1 Laporan	2,185,700		1 Laporan	2,404,270	1 Laporan	2,644,697	1 Laporan	2,644,697	1 Laporan	2,909,167	1 Laporan dan 1 Dokumen	4,172,700		Way Kanan
		1.6.2.9.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	1,810,000	1 Laporan	1,991,000		1 Laporan	2,190,100	1 Laporan	2,409,110	1 Laporan	2,409,110	1 Laporan	2,650,021	4 Laporan	3,801,000		Way Kanan
		1.6.2.9.1.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	1 Dokumen	1,803,000	1 Dokumen	1,983,300		1 Dokumen	2,181,630	1 Dokumen	2,399,793	1 Dokumen	2,399,793	1 Dokumen	2,639,772	2 Dokumen	3,786,300		Way Kanan
	1.6.4. Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100		100		100		100		100		100		100			
		1.6.4.9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	%	100	4,791,193,685	100	5,395,785,138	100	5,398,419,647	100	5,314,866,380	100	5,398,672,717	100	5,398,672,717	100	31,710,610,281		
		1.6.4.9.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		4,872,323,685	0	5,047,118,138	0	5,024,139,647	0	5,060,546,580	0	5,136,080,937	0	5,136,080,937	0	29,976,289,921			
		1.6.4.9.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	12 Bulan	4,380,187,600	22 Orang/Bula	4,818,206,360	22	4,833,633,803	22	4,833,633,803	22	4,888,581,351	22	4,888,581,351	12 bulan/22	9,198,393,960			Way Kanan
		1.6.4.9.1.2	Penyediaan dan Pengisian/Verifikasi Keanggotaan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	81,600,000	3 Dokumen	91,920,000	3	91,920,000	3	91,920,000	3	101,112,000	3	101,112,000	12 bulan/3 dokumen	173,520,000			Way Kanan
		1.6.4.9.1.3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan/Verifikasi Keanggotaan ASN	12 Bulan	3,066,000	1 Paket	4,544,681	1	4,497,381	1	4,544,681	1	4,544,681	1	4,544,681	12 bulan/1 paket	7,610,681			Way Kanan
		1.6.4.9.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan/Verifikasi Keanggotaan ASN	12 Bulan	22,392,185	1 Paket	27,968,404	1	27,968,404	1	27,968,404	1	27,968,404	1	27,968,404	12 bulan/1 paket	50,360,589			Way Kanan

										1 Paket	28,071,904	1 Paket	28,133,881	1 Paket	30,947,269	1 Paket	31,004,502	4 paket	118,137,556		
	1.6.4.9.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	3,577,900	1 Paket	3,978,690			1 Paket	4,376,559	1 Paket	4,814,215	1 Paket	5,295,636	1 Paket	5,238,403	12 bulan/1 paket	7,556,590	Way Kanan	
	1.6.4.9.1.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	16,500,000	1 Laporan	16,500,000			1 Laporan	11,640,000	1 Laporan	16,500,000	1 Laporan	16,500,000	1 Laporan	16,500,000	12 bulan/1 laporan	33,000,000	Way Kanan	
	1.6.4.9.1.7	Penyediaan Paket Dinas	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	65,000,000	2 Laporan	84,000,000			2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	81,000,000	2 Laporan	89,100,000	2 Laporan	89,100,000	12 bulan/2 laporan	149,000,000	Way Kanan	
	1.6.4.9.2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan		48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	0	290,400,000		
	1.6.4.9.2.1	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakain dinas beserta atribut kelengkapannya	36 Paket	23,400,000	36 Paket	23,400,000			36 Paket	23,400,000	36 Paket	23,400,000	36 Paket	23,400,000	36 Paket	23,400,000	72 Paket	46,800,000	Way Kanan	
	1.6.4.9.2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	5 Orang	25,000,000	5 Orang	25,000,000			5 Orang	25,000,000	5 Orang	25,000,000	5 Orang	25,000,000	5 Orang	25,000,000	10 Orang	50,000,000	Way Kanan	
	1.6.4.9.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16	77,000,000	16	77,000,000	16	81,500,000	16	75,000,000	16	82,500,000	16	82,500,000	16	82,500,000	16	475,500,000		
	1.6.4.9.3.1	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	12 Unit	42,000,000	12 Unit	42,000,000			12 Unit	43,000,000	12 Unit	40,000,000	12 Unit	44,000,000	12 Unit	44,000,000	24 Unit	84,000,000	Way Kanan	
	1.6.4.9.3.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	35,000,000	4 Unit	35,000,000			4 Unit	38,500,000	4 Unit	35,000,000	4 Unit	38,500,000	4 Unit	38,500,000	8 Unit	70,000,000	Way Kanan	
	1.6.4.9.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		58,770,000	0	133,947,000	0	83,248,000	0	71,719,800	0	72,491,780	0	72,491,780	0	72,491,780	0	555,668,360		
	1.6.4.9.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	63,000,000	3 Laporan	69,300,000			3 Laporan	76,230,000	3 Laporan	64,000,000	3 Laporan	64,000,000	3 Laporan	64,000,000	12 bln dan 3 Laporan	152,300,000	Way Kanan	
	1.6.4.9.4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Perbaikan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	5,800,000	2 Laporan	6,380,000			2 Laporan	7,018,000	2 Laporan	7,719,800	2 Laporan	8,491,780	2 Laporan	8,491,780	12 bln dan 2 Laporan	12,180,000	Way Kanan	
	1.6.4.9.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	52,970,000	4 Laporan	58,267,000			4 Laporan	64,093,700	4 Laporan	53,000,000	4 Laporan	58,300,000	4 Laporan	58,300,000	12 bulan dan 4 laporan	111,237,000	Way Kanan	
	1.6.4.9.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		34,700,000	0	89,320,000	0	61,132,000	0	59,200,000	0	59,200,000	0	59,200,000	0	59,200,000	112	362,782,000		
	1.6.4.9.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan roda empat yang mendapat biaya pemeliharaan	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000			2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	4	100,000,000	Way Kanan	
	1.6.4.9.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jalanan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	9,200,000	16 Unit	10,120,000			16 Unit	11,132,000	16 Unit	9,200,000	16 Unit	9,200,000	16 Unit	9,200,000	32	19,320,000	Way Kanan	
	1.6.4.9.5.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	25,500,000	2 Unit	29,200,000			2 Unit	32,120,000	2 Unit	25,500,000	2 Unit	35,000,000	2 Unit	35,000,000	4	54,700,000	Way Kanan	
	1.9. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Kampung		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Direhabilitasi)		0,6541 Poin	0,6558 Poin	0,6583	0,6608	0,6633	0,6658	0,6683	0,6658	0,6683	0,6683	0,6683	0,6683	0,6683				
	1.9.1. Meningkatkan Kualitas Kampung		Indeks Desa Membangun		3,00 Poin	3,05 Poin	3,13 Poin	3,19 Poin	3,29 Poin	3,29 Poin	3,29 Poin	3,29 Poin	3,29 Poin	3,29 Poin	3,29 Poin	3,29 Poin	3,29 Poin	19,302,125,000			
	1.9.1.1. PROGRAM PENATAAN DESA		Indeks Kategori Kampung		10	55,000,000	14	55,000,000	16	55,000,000	18	55,000,000	20	55,000,000	23	55,000,000	23	375,000,000	DINAS PMK		
	1.9.1.1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa		Cakupan Penataan Kampung	%	221 Desa	30,000,000	221 Desa	30,000,000	221 Desa	30,000,000	221 Desa	30,000,000	221 Desa	30,000,000	221 Desa	30,000,000	221 Desa	30,000,000	442	60,000,000	DINAS PMK
	1.9.1.1.1.1. Fasilitas Penataan Kewenangan Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewengannya		221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	663	120,000,000	DINAS PMK
	1.9.1.1.1.2. Fasilitas Penamaan dan Kode Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa		221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	1326	150,000,000	DINAS PMK
	1.9.1.2. PROGRAM Peningkatan Kerjasama Desa		Cakupan Kerjasama Kampung	%	7	200,403,600	10	200,403,600	14	200,403,600	21	200,403,600	23	200,403,600	25	200,403,600	25	200,403,600	25	1,202,421,600	DINAS PMK
	1.9.1.2.1. Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa		Jumlah Fasilitas Kerjasama Antar Desa		4	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	8	400,807,200	DINAS PMK
	1.9.1.2.1.1. Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	16	801,614,400	Way Kanan
	1.9.1.3. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Terbit Administrasi Kampung	%	100	726,107,400	100	809,843,400	100	295,942,500	100	295,942,500	100	295,942,500	100	295,942,500	100	295,942,500	100	2,803,456,800	DINAS PMK

	1.9.1.5.1.3	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.		27 Unit	75,750,000	27 Unit	75,750,000	27 Unit	75,750,000	27 Unit	75,750,000	27 Unit	75,750,000	162 Unit	454,500,000	DINAS PMK	Way Kanan		
	1.9.1.5.1.4	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	1 Dokumen		300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	6 Dokumen	1,800,000,000	DINAS PMK	Way Kanan		
	1.9.1.5.1.5	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	221 kelompok binaan TTG		195,352,900	1 Laporan	195,352,900							221 Kelompok binaan TTG dan 1 Laporan	390,705,800	DINAS PMK	Way Kanan		
	1.9.1.5.1.6	Facilitasi Bulas Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	195,352,900	1 Laporan	195,352,900	1 Laporan	195,352,900	1 Laporan	195,352,900	4 Laporan	781,411,600				
	1.9.1.5.1.6	Facilitasi Bulas Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang berpartisipasi dalam		3 Laporan	250,000,000	3 Laporan	250,000,000							6 Laporan	500,000,000	DINAS PMK	Way Kanan		
	1.9.1.5.1.7	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Bulas Bhakti Gotong Royong, Pelaksanaan karya bhakti dan TMMD reguler di Kabupaten	1 Kecamatan		1,116,900,000			3 Laporan	250,000,000	3 Laporan	250,000,000	3 Laporan	250,000,000	3 Laporan	250,000,000	12 laporan	1,000,000,000	DINAS PMK	Way Kanan
	1.9.1.5.1.8	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyelenggaraan Ketenraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1,116,900,000	1 Dokumen	1,116,900,000	1 Dokumen	1,116,900,000	1 Dokumen	1,116,900,000	1 Dokumen	1,116,900,000	5 dokumen	5,584,500,000	DINAS PMK	Way Kanan
	1.9.1.5.1.8	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	Terlaksananya program kerja PKK Kab. Way Kanan	1 tahun		318,799,600	1 Dokumen	318,799,600							1 th dan 1 Dokumen	637,599,200	DINAS PMK	Way Kanan		
	1.6. Menurusnya Tingkat Kemiskinan		Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan				1 Dokumen	318,799,600	1 Dokumen	318,799,600	1 Dokumen	318,799,600	1 Dokumen	318,799,600	4 dokumen	1,275,198,400	DINAS PMK	Way Kanan		
	1.6.3. Pemberdayaan Masyarakat Miskin																			
	1.6.3.14	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Lampung Yang Diberdayakan	%		0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	531,540,101	0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	3,650,661,101	DINAS PMK	Way Kanan	
	1.6.3.14.1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota.	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Facilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat																	
	1.6.3.14.1.1	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Penedayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah kelembagaan LPM yang ada	4 Dokumen			200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	16	800,000,000	DINAS PMK	Way Kanan	
	1.6.3.14.1.2	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang terbitasi	1 Dokumen			421,713,500	1	421,713,500	1	331,540,101	1	421,713,500	1	421,713,500	4	1,596,680,601	DINAS PMK	Way Kanan	
	1.6.4. Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbagai Pihak		Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Sinergi dengan Berbagai Pihak	%		0.30	621,713,500	0.30	621,713,500	0.30	531,540,000	0.30	621,713,500	0.30	621,713,500	0.30	3,650,661,000			
	3.6.4.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Yang diberdayakan Melalui Dana Desa	%		0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	531,540,000	0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	3,650,661,000	DINAS PMK	Way Kanan	

Tabel T.C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : (WAY KANAN UNGGUL DAN SEJAHTERA)			
MISI I : (MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah	1.1.5. Meningkatkan kualitas saking SKPD	1.1.5.9. Meningkatkan kualitas saking Dinas PMK	1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
			2. Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
			3. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			4. Melakukan Evaluasi kinerja perangkat daerah
1.6. Meningkatnya kinerja organisasi	1.6.2. Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara	1.1.5.9. Meningkatkan kualitas saking Dinas PMK	1. Melakukan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
			2. Melakukan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
			3. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
			4. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
			5. Melakukan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
			6. Melakukan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
			7. Melakukan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.6.4. Menyelenggarakan administrasi umum perangkat daerah	1.1.5.9. Meningkatkan kualitas saking Dinas PMK	1.1.5.9. Meningkatkan kualitas saking Dinas PMK	1. Melakukan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			2. Melakukan penyediaan bahan logistik kantor
			3. Melakukan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			4. Melakukan fasilitasi kunjungan tamu
			5. Melakukan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
			6. Melakukan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
			7. Melakukan pengadaan mebel
			8. Melakukan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
			9. Melakukan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
			10. Melakukan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
			11. Melakukan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
			12. Melakukan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
			13. Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

MISI III : (MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.9. Meningkatnya keberdayaan masyarakat kampung	1.9.1. Meningkatkan kualitas kampung	3.9.1.1. Meningkatkan penataan kampung	1. Melakukan fasilitasi penataan kewenangan desa 2. Melakukan fasilitasi penamaan dan kode desa
		3.9.1.2. Meningkatkan kerjasama kampung	1. Melakukan fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota
		3.9.1.3. Meningkatkan tertib administrasi kampung	1. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
			2. Melakukan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
			3. Melakukan fasilitasi penyusunan profil desa
			4. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD
			5. Melakukan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
			6. Melakukan fasilitasi penyusunan produk hukum desa
			7. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
			8. Melakukan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
			9. Melakukan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa
		3.9.1.4. Meningkatkan tertib administrasi keuangan kampung dan aset kampung	1. Melakukan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
			2. Melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
			3. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa
			4. Melakukan fasilitasi pengelolaan aset desa
		3.9.1.5. Pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan kampung	1. Melakukan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
		3.9.1.6. Mengembangkan kampung percontohan	2. Melakukan Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
3.9.1.7. Mengembangkan smart village	3. Melakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat		
	4. Melakukan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa		
	5. Melakukan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna		

			6. Melakukan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat
			7. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa
			8. Melakukan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga
1.6. Menurunnya tingkat kemiskinan	1.6.3. Pemberdayaan masyarakat miskin	3.6.3.14. Pemberdayaan masyarakat miskin di kampung	1. Melakukan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
			2. Melakukan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa

Tabel T.C.25
Reviu Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	1.1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah		Nilai evaluasi sakip kabupaten	58.64	59.64	60.64	61.64	62.64
		1.1.5. Meningkatkan kualitas sakip skpd	Nilai sakip skpd	50.34	52.75	55.17	57.58	60
2	1.6. Meningkatnya kinerja organisasi		Nilai komponen kinerja organisasi	4.95	5.25	5.55	5.85	6.15
		1.6.2. Meningkatkan kualitas aparatur sipil daerah (ASPD)	Indeks profesionalitas ASN Dinas PMK	60	61	62	63	64
		1.6.4. Menyelenggarakan administrasi umum perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100
3	1.9. Meningkatnya keberdayaan masyarakat kampung		Indeks Desa Membangun	0.6591	0.6641	0.6721	0.6809	0.6872
		1.9.1. Meningkatkan kualitas kampung	Indeks Kategori Kampung	3.05	3.13	3.19	3.25	3.29
4	1.6. Menurunnya tingkat kemiskinan		Angka kemiskinan	12.75	12.35	11.9	11.4	10.7
		1.6.3. Pemberdayaan masyarakat miskin	Cakupan pemberdayaan masyarakat miskin	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08

Tabel. T.C. 24
Reviu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Way Kanan
Periode 2016-2021

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
I	BELANJA DAERAH	6,738,878,682	9,068,331,608	6,705,863,435	6,348,836,387	3,928,350,285	5,863,426,850	8,347,723,202	6,258,458,590	5,901,243,413	3,649,908,583	87.01%	92.05%	93.33%	92.95%	92.91%	6,558,052,079	6,004,152,128
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,948,125,722	2,214,901,108	2,143,736,735	2,185,894,687	2,242,962,900	1,912,065,830	2,096,625,952	2,004,940,843	2,041,777,022	2,112,568,386	98.15%	94.66%	93.53%	93.41%	94.19%	2,147,124,230	2,033,595,607
III	BELANJA LANGSUNG	4,790,752,960	6,853,430,500	4,562,126,700	4,162,941,700	1,685,387,385	3,951,361,020	6,251,097,250	4,253,517,747	3,859,466,391	1,537,340,197	82.48%	91.21%	93.24%	92.71%	91.22%	4,410,927,849	3,970,556,521
	- BELANJA PEGAWAI	35,150,000	34,800,000	49,320,000	55,920,000	392,850,000	35,150,000	43,170,000	49,320,000	55,920,000	392,850,000							
	- BELANJA BARANG DAN JASA	4,360,302,960	6,811,630,500	4,448,056,700	4,041,618,800	1,292,537,385	3,536,915,020	6,202,302,250	4,141,979,747	3,738,320,591	1,144,490,197							
	- BELANJA MODAL	395,300,000	7,000,000	64,750,000	65,402,900	-	379,296,000	5,625,000	62,218,000	65,225,800	-							

Tabel. T.C. 23
 Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
 Tahun 2016-2021
 Kabupaten Way Kanan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
1	Persentase Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-	55,00	9,05	6,79	4,52	-	-	52,48	38,01	9,50	8,60	-	-	52,48	38,01	9,50	8,60

Tabel T-B.35.

Reviu Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No -1	Masalah Pokok -2	Masalah -3	Akar Masalah -4
1	Nilai IDM Kabupaten Way Kanan masih rendah.	1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat kampung dalam pembangunan	Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah.
2	Masih terdapat 9,50% Kampung Tertinggal.	2. Kurangnya kapasitas aparat pemerintah kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Sistem pendataan profil kampung / kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di kampung / kelurahan belum optimal.
3	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat rendah. Hal ini mengindikasikan lunturnya nilai-nilai kegotongroyongan, sehingga potensial menimbulkan permasalahan lebih lanjut dalam menghadapi tuntutan desa mandiri.	3. Kurangnya pengembangan teknologi tepat guna di pekampungan.	Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan pembangunan kawasan perdesaan masih rendah
		4. Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat kampung.	Semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat melalui pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) masih rendah.
		5. Kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan kampung.	Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di pekampungan masih rendah.
		6. Kurang optimalnya peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan kampung.	Pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui BUMDes masih rendah.
		7. Kurangnya pengembangan usaha ekonomi perkampungan.	Pemasyarakatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan masih rendah.
		8. Kurangnya koordinasi yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan.	Sistem administrasi pemerintahan kampung khususnya administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, pelaporan serta sistem pendataan dan informasi kampung / kelurahan belum optimal.

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan rumusan masalah pokok. Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran

Kolom (3) diisi dengan rumusan masalah. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi

Kolom (4) diisi dengan rumusan akar masalah. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum